

Implementasi Kebijakan Diklat Struktural Pim III Pada Dinas Pariwisata Dan Olahraga Kabupaten Batu Bara

Implementation of the PIM III Structural Education and Training Policy at the Batu Bara Regency Tourism and Sports Office

Khaira Nurul Atiah¹⁾, Badaruddin²⁾ & Nina Siti Salmaniah Siregar³⁾*

¹⁾Program Studi Magister Administrasi, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

²⁾Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 14 Mei 2022; Direview: 18 Mei 2022; Disetujui: 14 Juni 2022

*Corresponding Email: ninasitisalmaniah@staff.uma.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pariwisata di Kabupaten Batu Bara perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, mengingat potensi sumber daya alam di Kabupaten Batu Bara juga tidak sebanding dengan potensi kekayaan alam daerah lain di Sumatera Utara yang melimpah. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami, pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan penjelasan secara utuh dan terperinci tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian penulis. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang diberikan Alumni PIM III dari segi komunikasi bahwa pasca Diklatpim, Alumni PIM III mampu melakukan kebijakan-kebijakan segi komunikasi yaitu membentuk inovasi baru berupa Program Kelompok Sadar Pariwisata terhadap masyarakat sesuai dengan lokasi pariwisata yang ada di Daerah Kabupaten Batu Bara. Tugas dari Kelompok Sadar Wisata adalah memperkenalkan pada masyarakat luas akan sector pariwisata sehingga pariwisata tersebut mampu bersaing dengan pariwisata lainnya yang ada di Sumatera Utara ini.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Struktural Diklat PIM III

Abstract

The article aims to find out that tourism management in Batu Bara Regency needs serious attention from the local government, considering that the potential of natural resources in Batu Bara Regency is also not comparable to the abundant natural wealth potential of other regions in North Sumatra. This qualitative approach is used to find and understand what is hidden behind phenomena which are sometimes difficult to know or understand, this approach is also expected to be able to provide a complete and detailed explanation of the phenomena that are the focus of the author's research. The results of the study show that the policies provided by PIM III Alumni in terms of communication are that after the Diklatpim, PIM III Alumni are able to carry out policies in terms of communication, namely forming new innovations in the form of a Tourism Awareness Group Program for the community according to tourism locations in the Batu Bara Regency. The task of the Tourism Awareness Group is to introduce the wider community to the tourism sector so that tourism is able to compete with other tourism in North Sumatra.

Keywords: Policy Implementation; Structural Education and Training of PIM III

How to Cite: Atiah, K.N. Badaruddin & Siregar, N.S.S. (2022). Implementasi Kebijakan Diklat Struktural Pim III Pada Dinas Pariwisata Dan Olahraga Kabupaten Batu Bara, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (1): 564-573



PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis yang menimbulkan dampak berganda (multiplier effect), baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memberikan keuntungan ekonomi terhadap negara. Keuntungan tersebut biasa didapatkan dari pendapatan nilai tukar mata uang asing, pendapatan pemerintah, stimulasi pembangunan regional, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan dan pemeratakan pendapatan rakyat yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi di suatu wilayah/masyarakat (Suharyanto, et al., 2020; Lubis, et al., 2020; Suharyanto, et al., 2019).

Di samping nilai ekonomi dan nilai komersial yang tinggi, pariwisata sebenarnya memiliki berbagai potensi lain yang tidak bersifat ekonomi dan komersial, seperti peningkatan kualitas nilai-nilai sosial budaya, integritas dan jati diri, perluasan wawasan, persahabatan, konservasi alam dan peningkatan mutu lingkungan (Sirait et al., 2021; Pangemanan et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan. Selanjutnya pembangunan kepariwisataan berdasarkan asas ini diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah (Simarmata, & Saragih, 2020; Nugraheni et al., 2020).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur kewenangan daerah, berimplikasi pada perubahan yang berhubungan dengan perubahan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pembangunan kepariwisataan. Sistem ini meletakkan pondasi pembangunan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata daerah masing-masing (Aini, & Wulandari, 2021; Krisnanto, 2021). Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Memang masih ada bagian dari pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pada waktu yang lalu pemerintah pusat memiliki tugas dan kewenangan untuk pembangunan pariwisata di berbagai daerah, kewenangan tersebut sebagian besar telah dilimpahkan, sehingga seyogyanya daerah otonom dapat mengambil inisiatif pembangunan. Memutuskan apa di mana dan bagaimana pariwisata akan dikembangkan di daerah yang bersangkutan bersama dengan para pihak terkait, dengan memperhatikan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Sementara fungsi pemerintah pusat dalam hal ini 3 akan lebih kepada pengarah, pembinaan dan fasilitasi perencanaan atau kerjasama luar negeri dan sebagainya (Syafira et al., 2021).

Daerah tidak perlu menunggu, tetapi dapat mengambil inisiatif dan memutuskan bagi daerahnya masing-masing, apakah pariwisata memang dikehendaki dan diinginkan atau tidak. Dalam hal ini pembangunan pariwisata secara nasional tetap membutuhkan arah dan koordinasi dalam rambu-rambu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka percepatan pembangunan, hal tersebut harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah termasuk potensi pariwisata yang bisa dijadikan sebagai salah satu potensi yang berpeluang untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

Potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Berikut potensi wisata pada Kabupaten Batu Bara, sebagai berikut: Singapore Land Waterpark Batu Bara. Singapore Land Waterpark BatuBara (travelspromo.com); Pantai Bunga. Pantai Bunga (wisato.id); Wisata Alam Datuk; Istana Niat Lima Laras; Pantai Jono; Danau Laut Tador; Pulau Salah Namu dan Pantai Bogak

Fenomena dalam penelitian ini adalah kurangnya keseriusan Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara dalam menciptakan kawasan pariwisata, karena saat ini pariwisata yang ada di Kabupaten Batu Bara adalah merupakan factor pendukung bukan dijadikan sebagai factor utama dalam menunjang kawasan destinasi, kawasan pariwisata saat ini hanya merupakan pengunjung dosmetik semata khususnya bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara, dalam pengembangan lokasi pariwisata belum merata sehingga dan hal ini dapat dilihat pada lokasi pariwisata yang tertera diatas keramaian pengunjung hanaya di hari hari tertentu seperti hari libur dan hari besar semata. Untuk itulah Alumni PIM III membutuhkan kebjikan-kebijakan serta strategi agar berkemampuan dalam meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata.

Masih banyak kekurangan yang menjadi kendala dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di kabupaten Batu Bara. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang relatif kecil, menandakan bahwa pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Batu Baras perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, mengingat potensi sumber daya alam di Kabupaten batu Bara juga tidak sebanding dengan potensi kekayaan alam daerah lain di Sumatera Utara khususnya yang melimpah. Dengan mengembangkan potensi pariwisata yang berkelanjutan, dapat dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan PAD serta menumbuhkan ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah lain yang menjadi kendala dalam rangka pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Batu Bara adalah minimnya sarana prasarana penunjang di lokasi wisata, akses ke lokasi wisata yang kurang diperhatikan sehingga berdampak pada kurangnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara (asing). Hal ini disebabkan bahwa dalam hal pembangunan wisata masih di pegang PUPR Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara itu sendiri.

Selaku Alumni PIM III berkeinginan membangun inovasi-inovasi baru dalam melakukan kebjikan –kebijakan melalui “Program Sadar Parawisata”. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan adanya Pokdarwis di setiap daerah diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepariwisataan dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah itu. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan serta dalam pengembangan daerah wisatanya. Sehingga bukan hanya Pokdarwis yang akan mendapat manfaat namun juga masyarakat di sekitar daerah itu sendiri. Kepengurusan Pokdarwis terdiri dari pembina, penasehat, pimpinan, sekretariat, anggota, dan seksi-seksi (antara lain: kemandirian dan ketertiban, kebersihan dan keindahan, daya tarik wisata dan kenangan, hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha).

Pada hakekatnya kegiatan pembangunan pariwisata sama seperti pembangunan di sektor lain. Diperlukan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran dan fungsi yang penting adalah masyarakat. Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya berperan sebagai tuan rumah (host), namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: Untuk Mengetahui Implementasi dan factor penghambat dari Kebijakan Diklat Struktural PIM III Pada Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui

atau dipahami, pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan penjelasan secara utuh dan terperinci tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian penulis. Meninjau dari teori-teori di atas, maka peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran dari orang secara individu maupun kelompok, baik yang diperoleh dari data observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah: Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian Data tersebut berupa "Implementasi Kebijakan Diklat Struktural PIM III Pada Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara" Melalui observasi dan wawancara sebagai berikut: Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti. Wawancara (Interview) yaitu cara yang dilakukan peneliti kepada para pejabat Kepala Badan yang ada di Kantor Bupati Kabupaten Batu Bara sebagai berikut: Informan Kunci: Bapak Ishak SPd. M.Si Selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara; Informan Utama: Bapak Ronald Farel selaku Kabid Pariwisata Kabupaten Batu Bara; Informan Tambahan: Slah Satu Pegawai Dinas Pariwisata. Dokumentasi berupa foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian berupa dokumen atau laporan-laporan, berupa gambaran umum lokasi penelitian, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Field Research (Penelitian Lapangan). Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan dilakukan dalam mencari data dan informasi di mana penelitian dilakukan secara langsung terjun ke lapangan. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan tentang kondisi data dan informasi yang didapatkan serta gejala – gejala yang ada. Analisa data dalam penelitian ini menurut Moleong (2019) adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah melalui dari mengedit data, mengklarifikasikan. Mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang membagi menjadi tiga alur kegiatan.

Reduksi Data yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan tranmasi data mentah yang berasal dari catatan-catatan atau rekaman di lapangan. Penyajian data Yaitu penyusunan data informasi sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Struktural Diklat PIM III Pada Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara

Komunikasi. Pelaksanaan pasca Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Penyelenggara diklat Feedback yang diperoleh dari para alumni, unit organisasinya dan stakeholders lain dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi LAN-RI di Kabupaten Batu Bara dalam rangka perbaikan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan yang diikuti oleh ASN Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara. Maka itu peneliti melakukan wawancara bersama informan, adapun yang mncadi wawancaranya adalah bagaimana komunikasi dalam menciptakan sadar pariwisata yang diciptakan ASN setelah melakukan Diklat PIM IV pada masyarakat Daerah Kabupaten Batu Bara. Komunikasi pariwisata merupakan sarana komunikasi impersonal yang mencakup periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat yang dikonvergensiikan (digabung) dalam sebuah media jaringan online. Saat ini, promosi konvensional tidak bisa terlalu diandalkan.

Internet-lah yang menjadi tulang punggung baru untuk promosi pariwisata daerah. Pengelola harus memiliki website yang representatif dan informatif. Masalahnya, hal ini sampai sekarang masih diabaikan. Banyak website tentang potensi di daerah-daerah yang hanya asal ada dan tidak diperbarui secara rutin. Padahal, website inilah yang menjadi salah satu rujukan utama wisatawan domestik dan mancanegara sebelum memilih destinasi wisata. Selain website, media sosial dan efek *word-of-mouth*-nya saat ini juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan promosi.

Komunikasi dan pembangunan dalam kegiatan pariwisata menjadi suatu hal ketergantungan satu dengan lainnya. Terwujudnya suatu pembangunan pariwisata yang sejahtera di dalamnya tentu terdapat jalinan komunikasi yang baik antar komponen di dalam mewujudkan pembangunan pariwisata. Apabila kelompok sadar pariwisata mampu melakukan peranan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pariwisata cukup besar dan penting, karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan para wisatawan untuk mengetahui lebih mudah tentang tempat-tempat wisata yang ada sekalipun di daerah terpencil sekalipun.

Komunikasi menjadi ulasan-ulasan penting yang dilakukan dan diterapkan di bidang komunikasi pariwisata. Kajian ini mengulas bagaimana manajemen diterapkan di bidang komunikasi pariwisata, yaitu bagaimana memenej pemasaran pariwisata, memenej destinasi, memenej asesibilitas dan memenej SDM serta kelembagaan pariwisata. Bagaimana peran pimpinan dan leadership, bagaimana memenej orang-orang, memenej anggaran dan memenej alat-alat dan mesin komunikasi pariwisata pasca Diklatpim, Alumni PIM III mampu melakukan kebijakan-kebijakan segi komunikasi yaitu membentuk inovasi baru berupa Program Kelompok Sadar Pariwisata terhadap masyarakat sesuai dengan lokasi pariwisata yang ada di Daerah Kabupaten Batu Bara. Tugas dari Kelompok Sadar Wisata adalah bagaimana memperkenalkan pada masyarakat luas akan sector pariwisata sehingga pariwisata tersebut mampu bersaing dengan pariwisata lainnya yang ada di Sumatera Utara ini.

Sumber Daya Manusia. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salahsatunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata atau sebagai pekerja (*employment*). Sehingga aspek manusia salah satunya berperan sebagai motor penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata yang kreatif dan inovatif, dapat dipecahkan melalui pendekatan *whole of government* serta penularan semangat dan budaya berinovasi. Aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata baik bersifat *tangible* maupun *intangible* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan serta berdampak positif terhadap ekonomi, namun demikian pada saat ini Dinas Pariwisata dan Olah Raga mengalami kekurangan sumber daya manusia dalam pengelolaan sector pariwisata.

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu Daerah khususnya di Kabupaten Batu Bara. Keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (*tourist*) atau sebagai pekerja (*employment*). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (*wirausaha*) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar

kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

Alumni PIM III harusnya memiliki inovasi baru yang selama ini di sampaikan melalui Lembaga Administrasi Negara yang ditahbiskan sebagai reformasi sistem diklat yang sejatinya dimulai dari diklat prajabatan. Reformasi diklat dilakukan dengan perubahan yang sangat mendasar dalam hal tujuan khususnya di sector pariwisata. Diklatpim difokuskan pada pembentukan karakter birokrat profesional yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dan tertatannya etika publik yang tinggi, serta tidak berhenti pada pembentukan kompetensi saja sebagaimana berjalan selama ini. Perubahan yang cukup signifikan tersebut mencakup pada materi pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan (*leadership*) birokrasi di sektor pariwisata.

Kebijakan dari segi sumber daya manusia Alumni PIM III telah memiliki sumber daya manusia yang mapan tapi pihak Dinas Pariwisata dan Olah Raga mengalami kekurangan sumber daya manusia dalam pengelolaan sector pariwisata., namun demikian pariwisata di kawasan daerah Kabupaten Batu Bara mampu terlaksana dengan baik dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh Alumni PIM III dalam bentuk penerapan kebijakan berupa Kelompok Sadar Paraiwisata. (POKDARWIS) di setiap kawasan pariwisata.

Disposisi. Efek disposisi, sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

Dalam melaksanakan kebijakan sector pariwisata membutuhkan anggaran dalam penegmbangan pariwisata yang ada di Kabupaten Batu Bara, namun saat ini yang terjadi adalah anggaran yang tersedia sangat kurang memadai sehingga terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan teori Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Dalam hal ini para Alumni PIM III dituntut agar mmapu memberikan kebijkan-kebijakan untuk meningkatkan kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Batu Bara walaupun pariwisata tersebut hanya sebagai fungsi pendukung namun demikian selaku Alumni PIM III mampu mendongkrak Pendapatan Anggaran Daerah walaupun masih kurang signifikan dari sector pariwisata. Sesuai dengan teori Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi, ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan system pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode by passing personil.

Digitalisasi pariwisata sangatlah memudahkan pelaku wisata untuk menemukan dan memperluas koneksinya. Mudahnya berwisata secara digital ini didukung juga dengan fakta dilapangan, seperti mudahnya promosi pariwisata secara online melalui media sosial dan media lainnya, penjualan paket wisata yang dilakukan oleh penyedia jasa perjalanan juga dapat ditampilkan dan tersebar kepada masyarakat secara cepat. Selain itu internet memudahkan operasional penyedia jasa perjalanan dalam hal biaya operasional yang semakin murah. wisata seperti paket travel, travel agent, hotel, dan sebagainya juga dapat berinovasi dengan produknya dan menjalin kerjasama secara mudah tanpa harus datang langsung. Media sosial dan blog menjadi sebuah wadah tentang destinasi wisata dalam bentuk tulisan dan foto. Bahkan platform media sosial dapat menjadi tempat untuk para customer meninggalkan testimoninya dan

pengalamannya saat berwisata. Tentu hal ini akan membantu pariwisata dalam memasarkan dan meningkatkan brandnya.

Dalam pengambilan sikap menentukan suatu kebijakan Alumni PIM III sudah melakukan kebijakan berupa pengupayaan infrastruktur menuju destinasi pariwisata yang ada di kawasan wisata Kabupaten Batu Bara, selain itu Alumni PIM III juga mengambil langkah berupa program Digital pariwisata dalam bentuk pengenalan wisata melalui internet dalam bentuk website, media social lainnya.

Struktur Birokrasi. Membuat Standart Operating Procedures (SOP) yang lebih fleksibel adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Alumni PIM III membentuk Kelompok Sadar Wisata pada setiap lokasi Wisata yang ada di Kabupaten Batu Bara, dengan dibentuknya Program Sadar Wisata ini agar para pelaku pariwisata yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar daerah wisata.

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang usaha pariwisata, Pokdarwis memiliki beberapa program kerja yang menjadi kegiatan selama satu periode kepengurusan. Secara umum program kerja Pokdarwis yaitu: Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota pokdarwis dalam bidang kepariwisataan; Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya; Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat desa agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya; Mendorong dan memotivasi masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata di desa melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona; Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat; Memberikan masukan-masukan kepada pemerintah kecamatan dan desa, pemerintah daerah dan pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di desa setempat.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan memiliki struktur organisasi. Struktur Pokdarwis terdiri dari: Pembina, Penasehat, Pimpinan dan seksi-seksi dan anggota. Besarnya struktur organisasi Pokdarwis biasanya juga ditentukan oleh jumlah anggotanya yang disesuaikan dengan acuan dan peraturan kelompok dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dari penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa struktur birokrasi melalui Pokdarwis yang dinilai berhasil dilakukan Alumni PIM III di Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara adalah Pokdarwis Pantai Jono dan Pantai Wisata Alam Datuk, yang dianggap berhasil dan menjadi contoh pemberdayaan masyarakat pariwisata yang menghasilkan terbentuknya pokdarwis-pokdarwis lain di kawasan tersebut.

Faktor Hambatan Implementasi Kebijakan Diklat Struktural PIM III pada Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara

Minimnya Anggaran. Peneliti melakukan observasi dilapangan peneliti melihat bahwa minimnya anggaran belanja untuk kegiatan promosi wisata. Anggaran belanja untuk kegiatan promosi wisata yang diberikan hanya sepuluh persen dari total anggaran belanja Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara, anggaran belanja kegiatan promosi dirasa belum mampu untuk memenuhi target kegiatan promosi yang diinginkan oleh Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara demi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Batu Bara.

Sehubungan dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, perlu adanya solusi dalam memaksimalkan kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Batu Bara. Dengan kegiatan promosi yang tepat diharapkan penyelenggaraan kegiatan pariwisata akan meningkat. Kegiatan

pariwisata yang meningkat akan memberikan dampak positif. Salah satu dampak positif dari pariwisata yang dirasakan adalah dari aspek ekonomi. Dampak pariwisata terhadap aspek ekonomi yakni dapat menciptakan kesempatan bekerja dan berusaha, dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan pajak pemerintah, meningkatkan pendapatan nasional, dan memperkuat neraca pembayaran.

Kurangnya Sarana dan Prasarana. Hasil dari observasi peneliti Wisata Pantai Pantai Jono dan Pantai Wisata Alam Datuk merupakan salah satu obyek wisata yang sangat digemari masyarakat yang berada di Kabupaten Batu Bara. Pantai Jono dan Pantai Wisata Alam Datuk banyak di kenal oleh kalangan masyarakat Kabupaten Batu Bara dan saat ini menjadi tempat favorit bagi wisatawan yang berkunjung. Pantai Jono dan Pantai Wisata Alam Datuk terletak sangat strategis, wisatawan yang berkunjung sangat banyak apalagi di hari libur. Keindahan pantainya yang sangat indah yang menjadi keistimewaan di pantai tersebut. Pantai Jono dan Pantai Wisata Alam Datuk memiliki beberapa fasilitas yaitu: shelter-shelter, warung makan, toilet umum dan musholah. Daya tarik yang ada di Pantai Jono dan Pantai Wisata Alam Datuk masih belum optimal diantaranya kurangnya sarana penunjang untuk dapat dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Batu Bara. Hal ini berdasarkan keluhan wisatawan yang pernah berkunjung bahwa mereka kurang puas dengan adanya fasilitas yang berada di Pantai Jono dan Pantai Wisata Alam Datuk.

Menurut sebagian besar wisatawan yang pernah berkunjung bahwa sebagian besar sarana penunjang yang berupa fasilitas sekarang tidak bisa terpakai atau digunakan sehingga wisatawan tidak bisa menggunakan fasilitas sepenuhnya sesuai keinginan wisatawan. Namun yang menjadi permasalahan di Obyek Wisata Pantai Jono dan Pantai Wisata Alam Datuk belum adanya perhatian yang serius dari pemerintah, masih banyak sarana penunjang dalam hal fasilitas yang kurang dan belum memadai disisi lain masalah kesadaran SDM khususnya di bidang pariwisata yang masih kurang bisa menjadi salah satu penyebab kurangnya perawatan fasilitas yang ada di Obyek Pantai Jono dan Pantai Wisata Alam Datuk.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya pariwisata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sarana penunjang dalam hal fasilitas yang tersedia di Obyek Wisata Pantai Jono dan Pantai Wisata Alam Datuk hanyalah toilet, mushola, rumah makan, dan shelter. Fasilitas ini sangat sedikit untuk sebuah Obyek Wisata Pantai.

Kebijakan sector pariwisata yang dilakukan oleh Alumni PIM III guna meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) serta berbagai strategi dalam pengembangan pariwisata tersebut, maka hal ini peneliti menyesuaikan dengan sebuah teori yaitu Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik. Menurut Nugroho (2014), "implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya". Menurut Huntington (Mulyadi, 2015), perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu. Grindle (Waluyo, 2007) menyatakan, "implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluransaluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan". Sedangkan menurut Cleaves (Waluyo, 2007), "implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*)".

Selanjutnya menurut Hamdi (2014), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”. Mulyadi (2015) menyatakan, “implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”. Kemudian menurut Udoji (Mulyadi, 2015), “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan”.

Alumni PIM III sudah memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan sector pariwisata namun masih ada kekurangan dalam pengembangan pariwisata seperti minimnya anggaran dan kurangnya fasilitas di kawasan paraiwisata tersebut.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Diklat Struktural PIM III Pada Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara. Menunjukkan hasil kebijakan yang diberikan Alumni PIM III dari segi komunikasi bahwa pasca Diklatpim, Alumni PIM III mampu melakukan kebijakan-kebijakan segi komunikasi yaitu membentuk inovasi baru berupa Program Kelompok Sadar Pariwisata terhadap masyarakat sesuai dengan lokasi pariwisata yang ada di Daerah Kabupaten Batu Bara. Tugas dari Kelompok Sadar Wisata adalah bagaimana memperkenalkan pada masyarakat luas akan sector pariwisata sehingga pariwisata tersebut mampu bersaing dengan pariwisata lainnya yang ada di Suamtera Utara ini. dari segi sumber daya manusia Alumni PIM III telah memiliki sumber daya manusia yang mapan tapi pihak Dinas Pariwisata dan Olah Raga mengalami kekurangan sumber daya manusia dalam pengelolaan sector pariwisata., namun demikian pariwisata di kawasan daerah Kabupaten Batu Bara mampu terlaksana dengan baik dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh Alumni PIM III dalam bentuk penerapan kebijakan berupa Kelompok Sadar Paraiwisata. (POKDARWIS) di setiap kawasan pariwisata. Bahwa dalam pengambilan sikap menentukan suatu kebijakan Alumni PIM III sudah melakukan kebijakan berupa pengupayaan infrastruktur menuju destinasi pariwisata yang ada di kawasan wisata Kabupaten Batu Bara, selain itu Alumni PIM III juga mengambil langkah berupa program Digital pariwisata dalam bentuk pengenalan wisata melalui internet dalam bentuk website, media social lainnya. Dari segi bahwa struktur birokrasi melalui Pokdarwis yang dinilai berhasil dilakukan Alumni PIM III di Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara adalah Pokdarwis Pantai Jono dan Pantai Wisata Alam Datuk, yang dianggap berhasil dan menjadi contoh pemberdayaan masyarakat pariwisata yang menghasilkan terbentuknya pokdarwis-pokdarwis lain di kawasan tersebut. Adapun yang menjadi factor hambatan evaluasi ASN dalam mengikuti kompetensi Diklat PIM II dan III Tahun 2018 di Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara yaitu kurangnya bekerjasama dengan instansi khususnya secara internal dan kurangnya dukungan dari pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. Factor Hambatan Implementasi Kebijakan Diklat Struktural PIM III Pada Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara. Menunjukkan bahwa masih minimnya anggaran dalam pengembangan pariwisata baik itu dari segi infrastruktur maupun anggaran dan masih kurangnya pfasilitas pada lokasi wisata yang ada di kabupaten Batu Bara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. Penerbit: CV. Pustaka Setia. Bandung
- Aini, P., & Wulandari, S. (2021). Tahapan Pemberdayaan Berbasis Aset Komunitas pada Desa Wisata Pentingsari Yogyakarta. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 37-49. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i1.572>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Ghalia Indonesia.



- Krisnanto, W. (2021). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Tengger Mendapatkan Bagi Hasil Pendapatan Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 358-364. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.668>
- Lubis, F.R.A., Suharyanto, A., Effendy, R., Meidasari, V.E., Shahnaz, L. (2020). Role of Facebook Advertising in Promoting Tourism in Asia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1)
- Moleong, L. J. (2019). Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Mulyadi, M. S., & Anwar, Y. (2015). Corporate governance, earnings management and tax management. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 177, 363-366.
- Nugraheni, T., Budiman, A., & Rachmawati, D. (2020). Rekreasi, Hiburan, Belajar: Studi Kegiatan Wisata Seni dan Budaya di Saung Angklung Udjo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 693-702. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.396>
- Pangemanan, J., Rondonuwu, D., & Towoliu, B. (2021). Persepsi Pelajar terhadap Benteng Moraya Sebagai Atraksi Wisata Sejarah – Budaya di Tondano, Provinsi Sulawesi Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1067-1075. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.509>
- Sirmarmata, H., & Saragih, R. (2020). Citra Destinasi sebagai Strategi Peningkatan Jumlah Wisatawan Danau Toba "Monaco of Asia" di Kabupaten Samsir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 533-537. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.357>
- Sirait, R., Ginting, P., & wiflihani, w. (2021). Gondang Sabangunan sebagai Pengiring Sigale-Gale untuk Menarik Wisatawan di Museum Huta Bolon Kecamatan Simanindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 862-871. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.332>
- Suharyanto, A. Febryani, A. Wiflihani & Batubara, B.M. (2019). [Village Government Policy on Tourism Management in Situngkir Village](#) Research Article in Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (formerly ICCSSIS), ICCSSIS 2019, 24-25 October 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia.
- Suharyanto, A., Barus, R. K. I., & Batubara, B. M. (2020). Photography and Tourism Potential of Denai Kuala Village. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal*, 2(1), 100-108.
- Syafira, A., Kurniawati, E., & Hadi, N. (2021). Wisata Alam Coban Putri Sebagai Objek Dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa Tlekung. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1105-1112. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.809>
- Waluyo, (2007). Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Mandar Maju: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

